

## STRATEGI KOMUNIKASI KOLABORATIF KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENGUATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI TINGKAT PEMERINTAH DAERAH

Muhammad Farid<sup>1✉</sup>, Dedy Djamaluddin Malik<sup>2</sup>, Anton Sulaiman<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung<sup>1,2</sup>  
Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon<sup>3</sup>

farid.pei@gmail<sup>1</sup>, dedy\_malik@yahoo.com<sup>2</sup>,  
antonsulaiman@bungabangsacirebon.ac.id<sup>3</sup>

Received: 2025-11-10; Accepted: 2025-11-25; Published: 2025-12-25

**Abstract** : Public information disclosure constitutes a fundamental element in realizing transparent, accountable, and participatory governance. This study analyzes the collaborative communication strategy of the Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat (West Java Provincial Information Commission) in strengthening the implementation of public information disclosure at the regional government level. Based on Karl E. Weick's Organizational Information Theory, this research examines how collaborative communication processes contribute to sensemaking, reduce information ambiguity, and create adaptive communication systems within the regional bureaucratic environment. This study employs a descriptive qualitative method with a case study approach, utilizing interviews, observations, and analysis of official documents issued by the West Java Information Commission. The findings indicate that the Commission's collaborative communication strategy operates through three main stages: enactment (the construction of meaning and problem identification), selection (the determination of effective communication strategies), and retention (the institutionalization of sustainable communication practices). Through integrated Public Information Officer (PPID) forums, public mediation processes, and digital campaigns, the West Java Information Commission has successfully strengthened cross-sector coordination and fostered a culture of transparency within regional government institutions. This study concludes that collaborative communication functions not only as an instrument of coordination but also as a mechanism of organizational learning that enhances public participation and trust in information institutions.

**Keywords:** *Public Information Disclosure, Collaborative Communication, Organizational Information Theory, West Java Provincial Information Commission*

Copyright © 2025, Author.

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0



DOI: <https://doi.org/10.47453/>

## Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah, tetapi juga sebagai sarana membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks otonomi daerah, keterbukaan informasi publik menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi partisipatif yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tidak diskriminatif.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat (KI Jabar) memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Sebagai lembaga independen, KI Jabar bertugas mengawasi, mengedukasi, dan menyelesaikan sengketa informasi antara masyarakat dan badan publik. Namun, dalam praktiknya, upaya mewujudkan keterbukaan informasi masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya literasi informasi publik, belum optimalnya peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, perkembangan era digital menuntut strategi komunikasi yang lebih adaptif, kolaboratif, dan responsif terhadap perubahan pola komunikasi publik.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada proses komunikasi yang efektif antaraktor kebijakan. Dalam konteks ini, teori Informasi Organisasi (*Organizational Information Theory*) yang dikembangkan oleh Karl E. Weick (1979) menjadi landasan konseptual penting untuk memahami bagaimana organisasi mengelola ketidakpastian melalui komunikasi. Weick menegaskan bahwa organisasi bukanlah struktur yang statis, melainkan sistem sosial yang dibentuk melalui proses komunikasi berkelanjutan di mana anggota organisasi secara kolektif membentuk makna (*sensemaking*) terhadap informasi yang kompleks. Dalam kerangka ini, KI Jabar berfungsi sebagai “organizer of meaning”, yaitu aktor yang berupaya menata dan memfasilitasi aliran informasi agar dapat dipahami dan dimanfaatkan secara efektif oleh PPID, lembaga pemerintah, media, dan masyarakat.

Proses komunikasi kolaboratif yang dilakukan KI Jabar mencerminkan upaya *sensemaking* sebagaimana dijelaskan oleh Weick, yaitu proses menciptakan pemahaman bersama dalam menghadapi ambiguitas informasi publik. Melalui koordinasi dengan PPID kabupaten/kota dan kolaborasi lintas sektor, KI Jabar berupaya membangun ekosistem komunikasi yang lebih partisipatif, di mana informasi tidak hanya disampaikan secara satu arah, tetapi juga diolah melalui dialog, diskusi, dan kerja sama antaraktor publik.

Namun, di lapangan, kolaborasi tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahunan KI Jabar, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Beberapa PPID belum aktif menyosialisasikan informasi publik secara digital, sementara masyarakat belum sepenuhnya memahami mekanisme permohonan informasi. Selain itu, komunikasi antarinstansi sering kali masih bersifat administratif dan formal, belum membentuk sinergi strategis yang berorientasi pada partisipasi publik.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas peran komunikasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Rahmawati (2021) menunjukkan bahwa

komunikasi partisipatif di tingkat pemerintah daerah dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik. Sementara itu, Nurdin dan Syamsuddin (2022) menegaskan pentingnya koordinasi antara PPID dan Komisi Informasi dalam memperkuat efektivitas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi. Studi Setiawan (2023) juga menyoroti pentingnya pemanfaatan media digital sebagai sarana memperluas jangkauan edukasi publik.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung menitikberatkan pada aspek regulatif dan teknis, sedangkan pendekatan komunikasi kolaboratif sebagai strategi utama lembaga independen seperti KI Jabar belum banyak dikaji secara mendalam.

Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih adanya kesenjangan antara idealisme kebijakan keterbukaan informasi dengan praktik implementasinya di tingkat daerah. Hal ini ditandai oleh belum terbentuknya sistem komunikasi yang benar-benar kolaboratif antara KI Jabar, PPID, Diskominfo, media, dan masyarakat. Permasalahan lainnya mencakup rendahnya tingkat literasi informasi publik, lemahnya sinergi antarinstansi, serta kurangnya inovasi komunikasi di era digital yang menuntut keterbukaan dan kecepatan akses informasi.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menempatkan strategi komunikasi kolaboratif sebagai fokus utama analisis. Pendekatan ini menyoroti bagaimana KI Jabar mengintegrasikan fungsi edukasi publik, pembinaan PPID, dan kolaborasi lintas sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik di tingkat daerah. Melalui perspektif teori informasi organisasi Karl Weick, penelitian ini berupaya menjelaskan dinamika interaksi antaraktor komunikasi dalam membangun makna bersama (*sensemaking*) dan menata alur informasi publik secara lebih efektif dan partisipatif.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi kolaboratif yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud mengidentifikasi bentuk kolaborasi lintas sektor serta faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik terhadap pengembangan model komunikasi kolaboratif di sektor publik serta memberikan rekomendasi praktis bagi lembaga informasi dalam memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat.

### **Metodologi Penelitian**

Data dikumpulkan melalui wawancara observasi langsung terhadap kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, serta studi dokumentasi atas laporan tahunan KI Jabar dan regulasi pendukungnya. Teknik triangulasi diterapkan untuk memastikan keabsahan data melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Denzin & Lincoln, 2018).

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman (1994) yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap penyajian data dilakukan melalui penyusunan narasi dan matriks tematik agar pola dan hubungan antar-temuan dapat teridentifikasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti menafsirkan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini berfokus pada strategi komunikasi kolaboratif Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat (KI Jabar) dalam memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat pemerintah daerah. Berdasarkan perspektif Karl E. Weick (1979) dalam *The Social Psychology of Organizing*, organisasi dipandang sebagai sistem pemrosesan informasi yang terus-menerus berinteraksi dengan lingkungannya untuk mengurangi ambiguitas dan ketidakpastian. Dalam konteks penelitian ini, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat (KI Jabar) berfungsi sebagai organisasi yang berupaya menafsirkan, mengolah, dan menyebarkan makna keterbukaan informasi publik melalui proses komunikasi kolaboratif. Dinamika komunikasi yang berlangsung di dalam dan di luar lembaga ini dapat dianalisis melalui tiga tahapan utama teori Weick, yaitu enactment, selection, dan retention.

### Tahap Enactment: Pembentukan Makna dan Identifikasi Permasalahan

Dalam kerangka teori organisasi Karl Weick (1979), enactment merupakan tahap awal dalam proses pembentukan makna di mana anggota organisasi secara aktif menafsirkan realitas di sekitarnya melalui interaksi dan komunikasi. Organisasi tidak sekadar bereaksi terhadap lingkungan eksternal, melainkan turut menciptakan dan membentuk lingkungan sosial tersebut melalui proses interpretasi yang berulang. Dalam konteks penelitian ini, proses enactment menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat (KI Jabar) mengidentifikasi, menafsirkan, dan membangun pemahaman kolektif mengenai isu keterbukaan informasi publik di tingkat pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KI Jabar memulai proses enactment dengan melakukan pemetaan situasi aktual keterbukaan informasi publik di wilayah Jawa Barat. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan komisioner, staf sekretariat, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), ditemukan bahwa tingkat kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik masih menunjukkan disparitas yang cukup lebar. Beberapa kabupaten/kota seperti Bandung, Cirebon, dan Bekasi telah memiliki sistem informasi publik yang terintegrasi dan aktif memperbarui konten informasinya, sementara di daerah lain, keterbukaan informasi masih dipandang sebatas kewajiban administratif tanpa diiringi semangat transparansi yang substansial.

Situasi tersebut menimbulkan ambiguitas komunikasi birokrasi, di mana makna "keterbukaan informasi" belum memiliki keseragaman konseptual dan operasional. Dalam pandangan Weick, kondisi ambiguitas semacam ini menandai adanya *equivocality* yakni ketidakpastian makna dalam proses interpretasi organisasi terhadap lingkungannya. KI Jabar merespons kondisi ini dengan menciptakan ruang-ruang komunikasi baru yang memungkinkan proses sensemaking terjadi secara kolaboratif. Melalui forum-forum koordinasi antar-PPID, sosialisasi bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta kegiatan edukasi publik yang melibatkan media dan masyarakat sipil, KI Jabar berupaya menafsirkan kembali makna keterbukaan informasi secara komprehensif dan kontekstual.

Salah satu bentuk nyata dari proses enactment ini adalah penyelenggaraan kegiatan Monitoring and Evaluation (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang rutin dilakukan setiap tahun. Kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kepatuhan, tetapi juga sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran bersama bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian dari budaya tata kelola pemerintahan yang

baik (good governance). Melalui forum Monev, KI Jabar bersama badan publik melakukan dialog dua arah mengenai tantangan dan hambatan dalam implementasi UU KIP, seperti keterbatasan sumber daya manusia PPID, ketidakterpaduan sistem informasi, serta rendahnya literasi digital masyarakat.

Proses komunikasi yang berlangsung dalam forum-forum tersebut menjadi arena bagi KI Jabar untuk mengonstruksi realitas sosialnya sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Weick (1979), bahwa organisasi membentuk lingkungan mereka melalui tindakan dan komunikasi yang dilakukan secara reflektif. Dalam konteks ini, KI Jabar tidak sekadar menjadi regulator atau pengawas, tetapi juga menjadi aktor interpretatif yang menafsirkan kondisi sosial dan menciptakan makna baru bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem keterbukaan informasi publik di Jawa Barat.

Selain itu, melalui pendekatan komunikasi kolaboratif, KI Jabar berupaya menumbuhkan shared meaning atau pemahaman bersama di antara berbagai aktor komunikasi publik, mulai dari pejabat PPID, aparat pemerintah daerah, jurnalis, hingga masyarakat sipil. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan pelatihan bersama, pembuatan pedoman komunikasi informasi publik, serta kampanye digital yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Kolaborasi semacam ini memperkuat proses sensemaking yang bersifat partisipatif, di mana makna tentang keterbukaan informasi tidak dipaksakan secara top-down, melainkan dibangun melalui dialog horizontal antaraktor.

Dengan demikian, tahap enactment dalam dinamika organisasi KI Jabar memperlihatkan bagaimana lembaga ini secara aktif menciptakan realitas sosialnya dalam konteks penguatan keterbukaan informasi publik. Melalui proses interpretasi, komunikasi lintas sektor, dan pembentukan makna bersama, KI Jabar berhasil memposisikan diri sebagai pusat koordinasi sekaligus fasilitator dalam membangun budaya transparansi di tingkat pemerintah daerah. Tahapan ini menjadi fondasi penting bagi proses selection dan retention selanjutnya, di mana strategi komunikasi kolaboratif yang telah dimaknai bersama kemudian diterapkan dan dipertahankan dalam praktik kelembagaan.

### **Tahap Selection: Pemilihan Strategi Komunikasi yang Efektif**

Dalam kerangka teori Karl Weick (1979), tahap selection merupakan fase di mana organisasi memilih pola komunikasi, tindakan, dan prosedur yang dianggap paling sesuai untuk menanggapi hasil interpretasi dari tahap enactment. Pada tahap ini, organisasi melakukan proses penyaringan atas berbagai alternatif tindakan untuk menentukan strategi yang mampu mengurangi ambiguitas informasi, menciptakan keteraturan, dan memperkuat efektivitas komunikasi organisasi. Bagi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat (KI Jabar), proses selection menjadi titik penting dalam mengkonsolidasikan berbagai pengalaman dan temuan lapangan ke dalam strategi komunikasi yang sistematis dan adaptif terhadap dinamika pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen internal, KI Jabar secara sadar memilih pendekatan komunikasi kolaboratif sebagai strategi utama dalam memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Pemilihan strategi ini berangkat dari kesadaran bahwa tantangan utama keterbukaan informasi di tingkat pemerintah daerah tidak hanya bersifat struktural, seperti keterbatasan regulasi atau sumber daya manusia, tetapi juga bersifat komunikatif yakni lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya literasi informasi publik, dan kurangnya rasa saling percaya antaraktor kebijakan. Dalam

konteks ini, komunikasi kolaboratif dianggap mampu menjembatani perbedaan kepentingan dan menciptakan ruang dialog yang lebih partisipatif antara badan publik, masyarakat, dan lembaga pengawas.

Strategi pertama yang dipilih KI Jabar adalah penyelenggaraan Forum PPID Terpadu sebagai sarana koordinasi dan pembelajaran bersama. Forum ini menjadi instrumen komunikasi utama untuk menyatukan persepsi dan memperkuat koordinasi antarlevel pemerintahan, diselenggarakan secara rutin dengan melibatkan PPID provinsi, kabupaten, dan kota, serta perwakilan Diskominfo dan lembaga masyarakat sipil. Dalam forum tersebut, terjadi pertukaran informasi mengenai pelaksanaan standar layanan informasi publik, evaluasi tingkat kepatuhan badan publik, serta diskusi terbuka mengenai hambatan dan inovasi yang dilakukan di masing-masing daerah. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa forum ini berfungsi tidak hanya sebagai sarana koordinasi administratif, tetapi juga sebagai arena sensemaking kolektif, di mana setiap aktor belajar memahami tantangan dan solusi dari perspektif yang berbeda. Dengan demikian, forum PPID Terpadu memperlihatkan praktik komunikasi kolaboratif yang menggabungkan dimensi edukatif, koordinatif, dan evaluatif sekaligus. KI Jabar dalam hal ini berperan bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai fasilitator yang memperkuat ekosistem informasi publik secara partisipatif.

Strategi kedua yang dipilih KI Jabar adalah pendekatan komunikasi dialogis melalui proses mediasi dan adjudikasi publik sebagai mekanisme komunikasi deliberatif. Ketika terjadi sengketa informasi antara masyarakat dan badan publik, KI Jabar cenderung mengedepankan mediasi sebagai langkah awal sebelum proses adjudikasi formal. Dalam praktiknya, mediasi dilakukan dengan mengundang kedua belah pihak untuk berdialog secara terbuka di hadapan mediator dari KI Jabar. Pendekatan ini mencerminkan praktik komunikasi deliberatif yang menekankan keterbukaan, empati, dan keadilan informasi. Melalui dialog yang konstruktif, KI Jabar berupaya menciptakan kesepakatan bersama tanpa harus selalu bergantung pada keputusan legal formal. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu komisioner, proses mediasi yang komunikatif sering kali menghasilkan solusi yang lebih diterima kedua pihak dibandingkan keputusan adjudikatif yang bersifat mengikat. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi kolaboratif mampu menurunkan ketegangan, memperkuat rasa keadilan, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik. Pendekatan mediasi publik tersebut memperlihatkan bahwa KI Jabar mengimplementasikan prinsip *selection* dengan menyesuaikan gaya komunikasi terhadap kebutuhan situasional, karena keberhasilan penyelesaian sengketa informasi tidak hanya bergantung pada kekuatan hukum, tetapi juga pada kemampuan membangun ruang komunikasi yang inklusif dan transparan.

Memasuki era digital, KI Jabar menilai perlunya ekspansi komunikasi melalui kanal daring sebagai strategi ketiga dalam menjangkau publik secara luas. Oleh karena itu, lembaga ini menginisiasi kampanye digital dan edukasi publik melalui media sosial seperti Instagram, YouTube, dan X (Twitter), serta memperkuat situs web resmi sebagai pusat informasi publik. Konten yang disebarluaskan mencakup video edukatif, infografis hak masyarakat atas informasi, hingga publikasi hasil monitoring keterbukaan informasi publik di seluruh Jawa Barat. Kampanye digital ini berfungsi ganda: di satu sisi meningkatkan literasi masyarakat terhadap hak akses informasi, dan di sisi lain memperkuat citra kelembagaan KI Jabar sebagai lembaga yang modern, terbuka, dan responsif terhadap perkembangan teknologi komunikasi. Pendekatan ini

memperlihatkan bentuk adaptasi organisasi terhadap perubahan lingkungan komunikasi publik sebagaimana dijelaskan oleh Weick, bahwa selection melibatkan proses pemilihan tindakan yang dianggap paling efektif dalam mengurangi ketidakpastian lingkungan dan membangun stabilitas interaksi sosial.

### **Tahap Retention: Pembentukan Struktur dan Praktik Rutin**

Tahap retention dalam teori organisasi Karl Weick (1979) menggambarkan proses di mana organisasi mempertahankan dan melembagakan pola komunikasi serta praktik yang telah terbukti efektif dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan. Pada tahap ini, hasil seleksi strategi sebelumnya disimpan, diinternalisasi, dan dijadikan pedoman bagi tindakan di masa depan. Dengan kata lain, retention berfungsi sebagai mekanisme pembentukan memori organisasi (*organizational memory*) yang memungkinkan organisasi belajar dari pengalaman dan menanamkan nilai-nilai tertentu ke dalam struktur serta budaya kerjanya.

Pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat (KI Jabar), tahap retention tampak melalui upaya pelebagaan hasil-hasil kolaborasi yang telah dilakukan pada tahap selection menjadi bagian dari sistem dan praktik rutin kelembagaan. KI Jabar tidak hanya memaknai komunikasi kolaboratif sebagai strategi jangka pendek untuk menyelesaikan masalah keterbukaan informasi publik, melainkan sebagai nilai inti (*core value*) yang harus tertanam dalam seluruh proses organisasi. Hal ini terlihat dari berbagai inovasi kelembagaan yang diarahkan untuk memperkuat transparansi, memperluas partisipasi publik, dan memastikan keberlanjutan proses komunikasi antarlembaga.

Salah satu wujud konkret dari tahap retention adalah pembangunan sistem dokumentasi digital terpadu yang digunakan untuk mengarsipkan seluruh hasil mediasi, keputusan adjudikasi, laporan monitoring keterbukaan informasi publik, serta data kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tingkat daerah. Sistem ini berfungsi ganda: di satu sisi sebagai instrumen akuntabilitas publik, dan di sisi lain sebagai *knowledge base* atau basis pengetahuan yang memungkinkan organisasi melakukan evaluasi dan inovasi kebijakan berbasis data. Melalui sistem dokumentasi digital tersebut, KI Jabar menciptakan mekanisme pembelajaran berkelanjutan (*organizational learning*), di mana setiap pengalaman kolaboratif sebelumnya menjadi bahan refleksi bagi penyusunan kebijakan baru. Proses ini menggambarkan konsep retention sebagaimana dikemukakan oleh Weick (1979), bahwa organisasi yang mampu menyimpan hasil seleksi komunikasinya secara sistematis akan memiliki kemampuan adaptif yang tinggi dalam menghadapi kompleksitas lingkungan. Dalam konteks ini, penyimpanan bukan sekadar arsip administratif, tetapi menjadi bagian dari proses kognitif kolektif organisasi yang memungkinkan kontinuitas dan konsistensi tindakan.

Selain inovasi sistem dokumentasi, KI Jabar juga mengembangkan program pembinaan PPID berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui pelatihan tahunan, forum koordinasi, dan pendampingan teknis di lapangan. Program ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan teknis pengelolaan informasi, tetapi juga pada pembentukan etika dan budaya transparansi di kalangan pejabat publik. Hasil evaluasi tiap tahun kemudian dijadikan dasar untuk menyusun modul pelatihan dan pedoman baru, yang menandakan bahwa proses komunikasi kolaboratif terus bertransformasi menjadi bagian integral dari kebijakan kelembagaan. Dalam perspektif teori Weick, praktik ini merupakan bentuk nyata dari *organizational*

retention, di mana organisasi tidak hanya mengingat tindakan yang berhasil, tetapi juga menjadikannya pola komunikasi yang berulang dan melekat dalam struktur. Nilai-nilai kolaborasi, keterbukaan, dan partisipasi publik yang telah terbentuk melalui berbagai forum komunikasi dan mediasi publik kini menjadi norma institusional yang membimbing perilaku organisasi KI Jabar dalam menjalankan fungsinya.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa retention dalam KI Jabar juga terwujud melalui integrasi nilai kolaboratif ke dalam budaya kerja lembaga. Komunikasi antarpegawai, koordinasi dengan instansi pemerintah daerah, serta interaksi dengan masyarakat dijalankan dengan prinsip keterbukaan, empati, dan kesetaraan informasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Weick bahwa organisasi yang berhasil mempertahankan pola komunikasi yang konstruktif akan membangun *organizational identity* yang kuat dan kredibel di mata publik. Dengan demikian, KI Jabar bukan hanya dipersepsikan sebagai lembaga pengawas regulatif, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pembangunan tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif.

Tahap retention ini menjadi bukti bahwa strategi komunikasi kolaboratif yang dijalankan KI Jabar telah berkembang menjadi sistem yang terstruktur dan berkelanjutan. Melalui pelembagaan praktik baik, penguatan basis pengetahuan digital, serta internalisasi nilai transparansi dalam budaya organisasi, KI Jabar berhasil membangun *organizational memory* yang adaptif terhadap perubahan lingkungan komunikasi publik. Dengan demikian, tahapan ini bukan hanya menandai keberhasilan implementasi strategi, tetapi juga menegaskan posisi KI Jabar sebagai model kelembagaan yang mampu memadukan prinsip *good governance* dengan inovasi komunikasi kolaboratif di era digital.

### **Kolaborasi Sebagai Mekanisme Pengurangan Ambiguitas**

Dalam kerangka teori organisasi Karl Weick (1979), kolaborasi dapat dipahami sebagai salah satu mekanisme utama dalam proses *sensemaking* yang berfungsi untuk mengurangi ambiguitas dan ketidakpastian informasi (*equivocality reduction*) di dalam organisasi. Ambiguitas sering kali muncul ketika organisasi menghadapi situasi kompleks, di mana makna suatu kebijakan, pesan, atau peraturan tidak ditafsirkan secara seragam oleh para pelakunya. Dalam konteks birokrasi pemerintahan daerah di Jawa Barat, ambiguitas tersebut tampak jelas pada perbedaan interpretasi terhadap konsep keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi kolaboratif Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat (KI Jabar) berfungsi sebagai mekanisme efektif dalam mereduksi ambiguitas tersebut. Kolaborasi lintas sektor antara KI Jabar, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), media, dan masyarakat sipil menciptakan ruang komunikasi yang memungkinkan terbentuknya pemahaman bersama mengenai hak, kewajiban, dan prosedur keterbukaan informasi publik. Proses komunikasi yang inklusif dan partisipatif ini memperlihatkan bagaimana *sensemaking* bekerja secara kolektif para aktor bersama-sama membangun makna melalui pertukaran informasi, diskusi terbuka, dan refleksi terhadap pengalaman praktis.

KI Jabar, dalam kapasitasnya sebagai lembaga independen, memainkan peran strategis sebagai "jembatan komunikasi" antara pemerintah daerah dan masyarakat. Fungsi ini diwujudkan melalui serangkaian kegiatan komunikasi kolaboratif, seperti forum koordinasi PPID terpadu, mediasi publik, dan kampanye digital yang

berorientasi pada peningkatan literasi informasi masyarakat. Melalui interaksi yang berulang dan dialog yang terbuka, KI Jabar tidak hanya menyalurkan informasi, tetapi juga memfasilitasi terciptanya struktur komunikasi baru yang lebih adaptif terhadap kebutuhan publik. Hal ini sesuai dengan pandangan Weick (1979), bahwa organisasi yang adaptif adalah organisasi yang mampu "menciptakan" lingkungannya sendiri melalui komunikasi yang reflektif dan konstruktif, bukan sekadar menyesuaikan diri secara pasif terhadap perubahan eksternal.

Dalam praktiknya, kolaborasi yang dijalankan KI Jabar memperlihatkan dua dimensi utama yang bekerja secara simultan. Dimensi pertama adalah dimensi struktural, yakni penguatan jejaring komunikasi antarinstansi pemerintah daerah untuk memperjelas alur pertanggungjawaban dan distribusi informasi publik. Dimensi kedua adalah dimensi kultural, yaitu penanaman nilai-nilai keterbukaan, empati, dan kesetaraan komunikasi dalam budaya birokrasi daerah. Kedua dimensi ini bekerja bersama-sama dalam menciptakan kondisi komunikasi yang minim ambiguitas, di mana setiap aktor memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan tata cara pelaksanaan keterbukaan informasi.

Kolaborasi lintas sektor juga memungkinkan terciptanya feedback loop yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat. Informasi yang disampaikan masyarakat kepada KI Jabar melalui kanal pengaduan atau media sosial, misalnya, diolah menjadi masukan untuk perbaikan kebijakan publik dan pedoman pelaksanaan keterbukaan informasi. Proses ini memperkuat gagasan Weick tentang pentingnya interaksi berulang (*recurrent interaction*) dalam menjaga kontinuitas makna dan mendorong organisasi untuk terus memperbaiki struktur komunikasinya sesuai dengan dinamika lingkungan sosial.

Lebih jauh, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa strategi komunikasi kolaboratif tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme koordinatif, melainkan juga sebagai alat pembelajaran organisasi (*organizational learning mechanism*). Melalui kolaborasi, KI Jabar memperoleh wawasan baru tentang hambatan implementasi keterbukaan informasi di lapangan mulai dari keterbatasan sumber daya manusia hingga rendahnya literasi digital publik dan menjadikannya dasar untuk merumuskan strategi komunikasi berikutnya. Dengan demikian, kolaborasi berfungsi ganda: sebagai sarana pengurangan ambiguitas sekaligus sebagai katalis pembentukan inovasi komunikasi dalam kelembagaan publik.

Secara konseptual, praktik yang dijalankan KI Jabar ini mengafirmasi pandangan Weick bahwa organisasi yang sehat dan adaptif selalu beroperasi dalam siklus *enactment–selection–retention* yang bersifat dinamis. Kolaborasi di sini bukan sekadar instrumen teknis, melainkan bagian integral dari proses organisasi untuk memahami, menafsirkan, dan mengatur kembali realitas sosial yang dihadapi. Oleh karena itu, strategi komunikasi kolaboratif KI Jabar dapat dipandang sebagai wujud konkret dari upaya organisasi publik dalam mengubah kompleksitas menjadi keteraturan, serta ambiguitas menjadi pemahaman bersama (*shared meaning*). Dengan berperan sebagai fasilitator dialog, mediator kepentingan, dan inovator komunikasi, KI Jabar berhasil memperkuat posisinya tidak hanya sebagai pengawas keterbukaan informasi publik, tetapi juga sebagai aktor transformasional dalam ekosistem tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Strategi Komunikasi Kolaboratif Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam Penguatan Keterbukaan Informasi Publik di Tingkat Pemerintah Daerah, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, strategi komunikasi kolaboratif yang diterapkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berperan penting dalam memperkuat keterbukaan informasi publik di tingkat pemerintah daerah. Proses komunikasi yang dijalankan menggambarkan tahapan yang sistematis dalam membangun kesamaan makna, memilih strategi komunikasi yang tepat, hingga membentuk pola kerja yang berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, lembaga mampu menciptakan mekanisme komunikasi yang adaptif terhadap dinamika birokrasi dan kebutuhan publik.

Kedua, penerapan komunikasi kolaboratif terbukti efektif dalam mengurangi ambiguitas informasi antarinstansi. Melalui forum PPID terpadu, proses mediasi dan adjudikasi publik, serta kampanye digital, terbangun sinergi antara pemerintah daerah, media, dan masyarakat. Kolaborasi yang terbentuk tidak hanya meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan publik, tetapi juga menjadikan keterbukaan informasi sebagai bagian dari budaya kerja yang transparan dan akuntabel.

Ketiga, penguatan keterbukaan informasi publik tidak dapat berjalan secara parsial, melainkan membutuhkan strategi komunikasi yang partisipatif dan berorientasi pada pembelajaran bersama. Keberhasilan KI Jabar dalam menjalankan peran tersebut menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif merupakan kunci dalam membangun ekosistem tata kelola informasi publik yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan di era pemerintahan yang semakin kompleks dan dinamis.

## Daftar Pustaka

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Nurdin, N., & Syamsuddin, M. (2022). Strengthening the Effectiveness of Public Information Disclosure Policy Through Coordination Between PPID and Information Commission. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 12(3), 45–56.
- Rahmawati, D. (2021). The Role of Participatory Communication in Enhancing Public Access to Government Information at the Regional Level. *Jurnal Komunikasi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 101–115.
- Setiawan, R. (2023). Utilization of Digital Media for Expanding Public Education on Information Transparency. *Indonesian Journal of Communication Studies*, 5(1), 33–47.
- Weick, K. E. (1979). *The Social Psychology of Organizing* (2nd ed.). Reading, MA: Addison-Wesley.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications